



FX Risang Baskara



Cari di sini...



Buat Tulisan

[News](#) [Entertainment](#) [Tekno & Sains](#) [Woman](#) [Bisnis](#) [Otomotif](#) [Food & Travel](#) [Bola & Sports](#) [Mom](#) [Bolanita](#) [Lainnya :](#)

[Breaking News](#) [Lebaran 2026](#) [Green Initiative](#) [Halal Living](#) [Video Story](#) [Audio Story](#) [Trending](#) [kumparanPLUS](#) [Opini & Cerita](#)



27 Ramadan 1447 H

Selasa, 17 Maret 2026

Yogyakarta



Imsak

04:18

Subuh

04:28

Dzuhur

11:50

Ashar

15:00

Maghrib

17:54

Isya

19:03

[Lihat Jadwal Selengkapnya](#) →



Edit



Hapus

[Beranda](#) > [News](#)

Konten dari Pengguna

Nasionalisme Berbungkus Melodi: Ketika Ritual Menggusur Nalar Pendidikan



Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Senin pagi yang gerah. Di ribuan lapangan sekolah, dari kota megah hingga pelosok yang berdebu, jutaan kaki kecil berdiri tegak. Mereka mencoba khidmat di bawah sengatan matahari yang mulai membakar ubun-ubun, sementara mata mereka tertuju pada selembur kain yang perlahan naik ke angkasa. Ritual ini baru saja kembali "disakralkan". Melalui Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, upacara bendera ditegaskan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan instruksi wajib sebagai "wahana pendidikan karakter" yang harus digiatkan kembali secara konsisten.

Namun, mari kita menatap lebih tajam ke balik kibaran kain merah putih itu. Di balik barisan yang rapi dan seragam yang disetrika licin, ada sebuah keganjilan yang menukik: Apakah kita sedang mendidik warga negara yang kritis, atau sekadar melatih sebuah paduan suara yang patuh? Sebagai pendidik, saya merasa ada sesuatu yang kurang pas ketika karakter bangsa coba "disuntikkan" melalui prosedur administratif ketimbang melalui kedalaman proses berpikir di ruang-ruang kelas.





Paduan Suara Kepatuhan. Sumber: Ilustrasi generatif OpenAI (DALL·E).

Ikrar yang Simplistik di Tengah Krisis Nalar

Instruksi ini datang dengan "paket lengkap". Setelah naskah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dibacakan, siswa kini wajib mengucapkan Ikrar Pelajar Indonesia secara serentak. Isinya? Belajar baik, menghormati orang tua dan guru, rukun sama teman, dan mencintai tanah air . Nilai-nilai ini tentulah (sangat) mulia. Tidak ada nalar sehat yang akan membantah pentingnya kerukunan atau rasa hormat. Namun, masalahnya bukan pada nilai yang dibawa, melainkan pada cara nilai itu dikomunikasikan.

Kita sedang menghadapi kenyataan pahit yang terekam dalam hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Skor nasional kita pada jenjang SMA menunjukkan potret nalar yang sangat rapuh: nilai rata-rata untuk Bahasa Indonesia tercatat 57,39, Matematika 37,23, dan Bahasa Inggris hanya 26,71. Sementara itu, untuk jenjang SMK, nilai rata-rata TKA Bahasa Indonesia 53,62, Matematika 34,74, dan Bahasa Inggris 22,55. Di tengah krisis literasi dan numerasi yang akut ini, negara justru memilih untuk menyeragamkan kata-kata dalam sebuah ritual verbal yang sangat simplistik.



"belajar dengan baik" atau "rukun" jika nalar mereka tidak dilatih untuk memahami konteks sosial di sekitarnya? Menggiatkan upacara itu memang lebih "murah" dan terlihat bagus di foto dokumentasi birokrasi, namun membenahi kualitas pengajaran itu jelas lebih "mahal" dan butuh keringat dari implementasi kebijakan-kebijakan yang nyata.

Nyanyian "Rukun" dan Narsisme Birokrasi

Keanekan ini berlanjut. Setelah ikrar diucapkan, upacara kini wajib ditutup dengan menyanyikan lagu berjudul "Rukun Sama Teman". Ada sebuah fakta yang membuat saya tertegun: lagu yang dianjurkan untuk dinyanyikan oleh jutaan siswa di seluruh Indonesia ini ternyata adalah ciptaan pejabat yang mengeluarkan surat edarannya sendiri, yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Ini adalah sebuah anomali. Di saat dunia pendidikan kita sedang berjibaku dengan masalah-masalah yang bersifat eksistensial (seperti kesejahteraan guru honorer yang kian terjepit dan standar kompetensi yang jalan di tempat) negara justru sibuk mengatur hingga ke daftar putar lagu upacara. Mengapa pendidikan kita kembali dipersempit menjadi ritual simbolik yang terasa seperti panggung narsisme birokrasi? Di mana ruang bagi keberagaman ekspresi budaya sekolah jika hingga lagunya pun harus seragam dan datang dari "pusat"?



seharusnya tumbuh dari sekolah yang aman dan guru yang terus didukung, bukan dari ritual yang bisa diprediksi secara mekanis.

Paradoks Gizi: Kenyang di Perut, Lapar di Nalar

Kritik ini kian menukik saat kita melihat peta anggaran tahun 2026. Di satu sisi, negara sangat gencar mengampanyekan kerukunan dan karakter. Di sisi lain, prioritas finansial berkata lain. Badan Gizi Nasional mendapatkan alokasi anggaran raksasa sebesar Rp223,55 triliun, sementara Kemendikdasmen hanya diberikan Rp56,68 triliun.

Anggaran untuk mengisi perut anak-anak kita melalui program makan gratis ternyata hampir lima kali lipat lebih besar daripada anggaran untuk mengisi nalar mereka di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kita seolah sedang membangun bangsa yang fisik dan ototnya kuat, namun otaknya dibiarkan malnutrisi secara sistemis. Bagaimana lagu "Rukun Sama Teman" bisa terdengar gembira jika guru yang melatihnya sedang menahan tangis karena upahnya tidak mencukupi?

Realitas di media sosial baru-baru ini memperlihatkan video memilukan: seorang guru honorer menangis sesenggukan saat mengetahui bahwa gaji sopir logistik untuk program makan gratis justru jauh lebih tinggi dari gajinya sebagai pendidik. Ada



lapangan, melainkan dari rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap warga negara, termasuk para gurunya.

Upacara: Sarana atau Tujuan Akhir?

Menteri Abdul Mu'ti menegaskan bahwa upacara adalah wahana pendidikan karakter. Pernyataan ini benar, namun ia hanya akan menjadi kebenaran yang hampa jika tidak dibarengi dengan pembenahan substansial. Upacara bendera seharusnya menjadi momen kontemplasi kolektif, bukan beban administratif yang mekanis. Jika upacara hanya menjadi ajang penyeragaman tanpa makna, maka kita sedang mewariskan budaya kepatuhan buta kepada generasi mendatang.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana nalar kritis ikut dirayakan. Pendidikan kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Kita butuh investasi pada kualitas guru, pada kelengkapan perpustakaan, dan pada kurikulum yang tidak sering berganti tanpa arah yang jelas. Kita butuh siswa yang mampu membedah masalah logika, bukan sekadar siswa yang pandai berbaris rapi.

Jangan sampai upacara bendera hanya menjadi "obat penenang" bagi publik agar terlihat seolah-olah pendidikan karakter sudah berjalan.



Senin pagi.

Kenyang yang Sunyi. Sumber: Ilustrasi generatif OpenAI (DALL·E).

Membangun Peradaban Lewat Nalar yang Merdeka

Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap optimis, namun optimisme itu harus berdiri di atas fondasi kritik yang tajam. Masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa keras suara siswa saat bernyanyi di lapangan, melainkan oleh seberapa tajam pikiran mereka saat menghadapi tantangan global.

Tujuan akhir dari seluruh kegaduhan kebijakan ini haruslah siswa. Bukan citra kementerian, bukan popularitas lagu sang menteri, tapi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Berikan guru-guru kita martabat yang layak. Berikan siswa-siswa kita gizi untuk nalar mereka, bukan sekadar gizi untuk fisik mereka.

Negara tidak boleh hanya mahir mengukur, lalu berharap hasil membaik dengan sendirinya melalui seremoni. Perubahan pendidikan tidak bekerja seperti pembaruan aplikasi ponsel (semata). Ia bekerja lewat relasi manusia yang mendalam, murid yang didengar, dan kebijakan yang jujur pada realitas. Mari kita jadikan upacara bendera



belajar dari kesalahannya sendiri. Karena pada akhirnya, peradaban yang besar dibangun oleh nalar yang merdeka, bukan oleh barisan yang sekadar mengikuti irama saja.

Salam Cerdas dan Humanis.

[Pendidikan](#)

[Upacara](#)

[Sekolah](#)

[Guru](#)

[Nasionalisme](#)

[Ritual](#)

[Pendidikan di Indonesia](#)

[Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah](#)

[MBG](#)

[Mendikdasmen](#)



Tim Editor